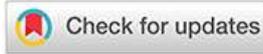


ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



^{1*}Muhammad Khaerul Umam, ²Eny Rochinda, ³Rahmad Budi Suharto

*^{1,2,3}Magister Ilmu Ekonomi, Faculty of Economics and Business,
University of Mulawarman - Indonesia*

e-mail:

^{1*}khaerulumam@gmail.com (*corresponding author*)

²eny.rochaida@feb.unmul.ac.id

³rahmad.budi.suharto@feb.unmul.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the financial management performance of the Balikpapan City Regional Government using income variance analysis, degree of decentralization ratio, independence ratio, income growth ratio, efficiency analysis, effectiveness analysis, capital expenditure ratio, and operational expenditure ratio in the Balikpapan City Government for the budget year 2016 to 2022. The data used is secondary data contained in the Audit Results Report of the Republic of Indonesia Financial Audit Agency Representative of East Kalimantan Province for 2016 to 2022. Static analysis in this study uses descriptive quantitative methods. The observation period from 2016 to 2022 shows that income variance analysis is the best average achievement of 101.20%; the degree of decentralization ratio with an average achievement of 29.48%; independence ratio to average achievement is 42.87%; local original income ratio with an average achievement of 5.87%; total regional income ratio to average achievement is 4.50%; the efficiency level ratio with an average achievement of 96.80% is declared less efficient; the effectiveness level ratio with an average achievement of 108.43% was declared less effective, the capital expenditure ratio with an average achievement was 72.58%;-operational expenditure ratio with average achievement of 25.98%

Keywords: *Local Finance; Financial Performance; Financial Ratio*

Diterima (Received) : 26-06-2024

Direvisi (Revised) : 06-07-2024

Disetujui (Approved) : 10-07-2024

Dipublikasi (Published) : 13-07-2024



©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)
Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) :
CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

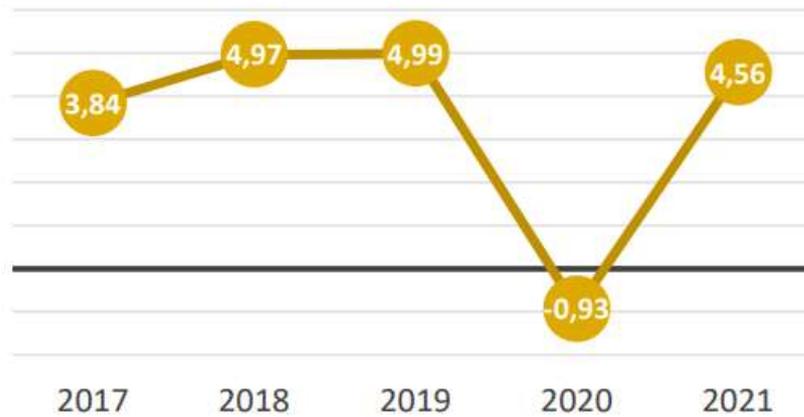
PENDAHULUAN

Tujuan negara telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam menggapai tujuan tersebut dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam hal pendapatan nasional yang menunjukkan seberapa besar aktivitas secara keseluruhan (Rahmayati, 2016). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan tentang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 asas-asas umum penyelenggaraan negara adalah:

- a) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. (Anis dan Nur, 2017)
- b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. (Badrudin, 2012)
- c) Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif. (Dewi, dan Anderson, 2014)
- d) Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. (Faisal, 2020)
- e) Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- f) Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan peningkatan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa ditetapkannya daerah otonom artinya pemerintah daerah berwenang dalam mengatur pelaksanaan urusan pemerintahannya sendiri. Dengan adanya daerah otonom maka berlaku asas desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan harapan pemerintah daerah mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dengan lebih baik, teratur, dan kondusif sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan (Frida, dkk, 2021). Desentralisasi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan akurat terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik yang terdapat pada masing-masing daerah. Salah satu alat ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah melalui rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya (Halim, 2009).

Gambar 1 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021 (2022)

Gambar 1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan tahun 2017-2021

Selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Kota Balikpapan terus mengalami pertumbuhan ekonomi berkisar 1% sampai 5% meskipun pada tahun 2020 terjadi kontraksi -0,93%, akan tetapi kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 4,56%. Pada tanggal 13 Maret tahun 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 menetapkan bahwa bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional. Disamping itu persentase pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi beberapa indikator salah satunya yaitu penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah dapat berupa antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Berupa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Penerimaan Sah lainnya (Halim, 2009). Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari wilayah sendiri atau masih masuk dalam wilayah geografis daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain Pendapatan Asli Daerah, setiap daerah memiliki sumber pendapatan lain yaitu berupa dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan tetapi dana dari perimbangan tidak selalu besar dan setiap daerah mempunyai perbedaannya. Salah satu alasan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola pendapatannya karena terdapat potensi dan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat (Halim, 2017)

Faktor penentu pertumbuhan ekonomi selanjutnya adalah belanja modal. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi contohnya pembelian property, pabrik, tanah, gedung dan lainnya. Belanja modal pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini bisa dikorelasi jika pendapatan tinggi suatu daerah maka akan berbanding lurus dengan tingginya belanja modal pemerintah (Handayani, 2017). Demi menjaga stabilitas dan keseimbangan kontrol terhadap pemerintah, perlu adanya pengukuran kinerja dari sebuah pemerintahan yang menunjukkan bagaimana pelaksanaan dari otonomi daerah

tersebut berjalan, sehingga hal tersebut sangat penting untuk dilihat oleh masyarakat. Pengukuran kinerja sendiri sangatlah penting untuk menilai, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif (Hery, 2015). Salah satu ukuran kinerja pada pemerintah terdapat pada pengukuran kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai keluaran hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Ihwanudin et al., 2020)

Menurut Halim (2016: 24), "pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah", sedangkan menurut Masdiantini dan Erawati (2016:3), "kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, ekonomi, efektivitas dan efisiensi". Analisis rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja (Rahmawati, 2016). Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (Surastowo, 2019). Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar pos yang ada di antara laporan keuangan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah (Faisal, 2020). Kondisi ini mendorong peningkatan dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah terhadap kinerja, adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara pemerintah yang telah menerima amanat dari rakyat untuk menjalankan roda perekonomian, pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan (Rahmawati, 2019). Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang pengukuran kinerja keuangan daerah Kota Balikpapan berdasarkan rasio yang tersedia dari penelitian terdahulu untuk dikembangkan dan mengukur kinerja pemerintah daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan tingkat kemandirian pemerintah daerah terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (Muttaqin et al., 2020). Menurut teori yang berkembang disertai penelitian terdahulu, semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Desentralisasi adalah wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan bahwa tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber

pendapatan yang diperlukan daerah (Nugroho et al., 2023). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah mengartikan bahwa tingkat ketergantungan daerah semakin tinggi terhadap bantuan pihak eksternal.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang dimaksud atau selama beberapa periode anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif (Dewi, dkk, 2014). Hal ini perlu dilakukan untuk menyikapi program-program yang telah dibuat.

Analisis Efisiensi Keuangan Daerah

Analisis Efisiensi Keuangan Daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat realisasi belanja daerah dengan membandingkan anggaran belanja daerah pada tahun berjalan (Septa, 2022). Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika lebih dari 100% mengidentifikasi terjadinya pemborosan anggaran atau penggunaan anggaran melebihi dari batas yang semestinya. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik karena penggunaan anggaran disesuaikan dengan anggaran belanja yang ada.

Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut teori dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Nenda, 2022).

Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Keserasian Belanja Daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasional dan belanja modal secara optimal menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia (Miswati, 2020). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasional berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio Belanja

Rasio Belanja Operasional merupakan perbandingan antara total belanja operasional daerah dengan total belanja daerah selama periode tahun berjalan (Mahmudi, 2010:164).

Rasio Belanja Modal merupakan antara total belanja modal dengan total belanja daerah. Menurut teori dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, Semakin tinggi rasio belanja modal pada suatu daerah maka akan kecil realisasi total belanja yang digunakan (Mahmudi, 2010:164).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Sujarweni, 2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa time series data selama tujuh (7) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Sumber data berasal dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan serta sumber tertulis lainnya dengan cara menganalisis varian dan rasio keuangan Kota Balikpapan.

Analisis data nya menggunakan rumusan sebagai berikut:

- a. Derajat Desentralisasi

$$\frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

- b. Rasio Kemandirian

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan Daerah}} \times 100$$

- c. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

$$\frac{PAD \text{ tahun } t - PAD \text{ Tahun } t - 1}{PAD \text{ Tahun } t - 1} \times 100\%$$

- d. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- e. Efektivitas Keuangan Daerah

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

- f. Rasio Belanja Operasional

$$\frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

- g. Rasio Belanja Modal

$$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan merupakan salah satu indikator melihat pencapaian suatu organisasi dalam memanfaatkan sumber dayanya untuk mencapai tujuan. Indikator kinerja keuangan hal yang paling sering dibahas dalam menentukan tolak ukur kinerja dari sebuah organisasi (Miswati dan Anggiat, 2020) Dalam penelitian ini, dibuat suatu analisis tentang kinerja keuangan dari sebuah organisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan dalam kurun waktu 2016-2022. Analisis yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan pada penelitian ini adalah:

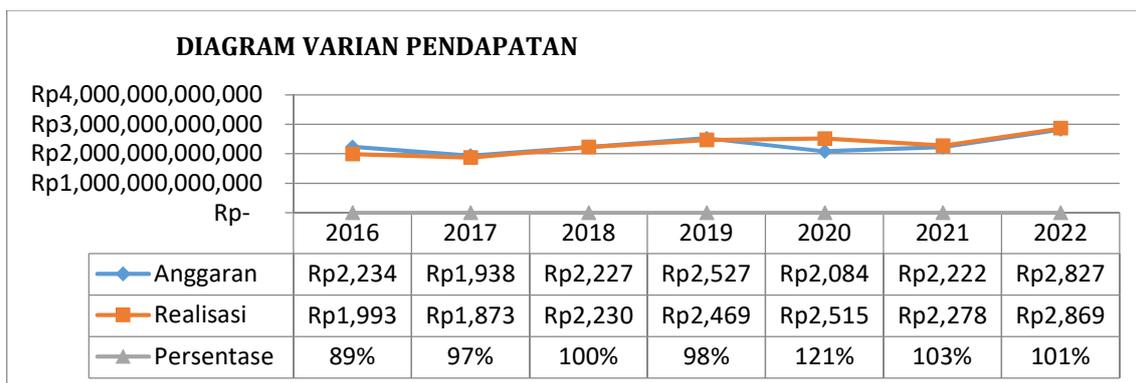
Analisis Varian Pendapatan Daerah

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKAD) Kota Balikpapan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 (Musthafa, 2017). Berikut ini perhitungan varian pendapatan daerah Kota Balikpapan tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 1
Analisis Varians Pendapatan Daerah Kota Balikpapan
Tahun 2016-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians atau Selisih	Persentase
2016	Rp2.234.750.897.296	Rp1.993.392.905.725	-Rp241.357.991.571	89%
2017	Rp1.938.309.743.312	Rp1.873.966.991.358	-Rp64.342.751.954	97%
2018	Rp2.227.832.853.277	Rp2.230.736.621.233	Rp2.903.767.956	100%
2019	Rp2.527.027.291.918	Rp2.469.528.492.671	-Rp57.498.799.247	98%
2020	Rp2.084.616.352.502	Rp2.515.508.487.764	Rp430.892.135.262	121%
2021	Rp2.222.150.032.524	Rp2.278.259.847.190	Rp56.109.814.666	103%
2022	Rp2.827.398.879.589	Rp2.869.130.120.906	Rp41.731.241.317	101%
Rata-rata	Rp2.294.583.721.488	Rp2.318.646.209.550	Rp24.062.488.061	101%

Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)



Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)

Gambar 2
Analisis Varians Pendapatan Daerah Kota Balikpapan
Tahun 2016-2022

Dari tabel 1 dapat terlihat bahwa varian pendapatan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2020 merupakan puncak terbaik dari kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2022 dengan pencapaian sebesar 20,67% atau Rp430.892.135.262,14 dan periode tahun 2016 merupakan periode dalam titik terendah dengan pencapaian sebesar (10,8%) atau (Rp241.357.991.570,82).

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Rasio Derajat Desentralisasi

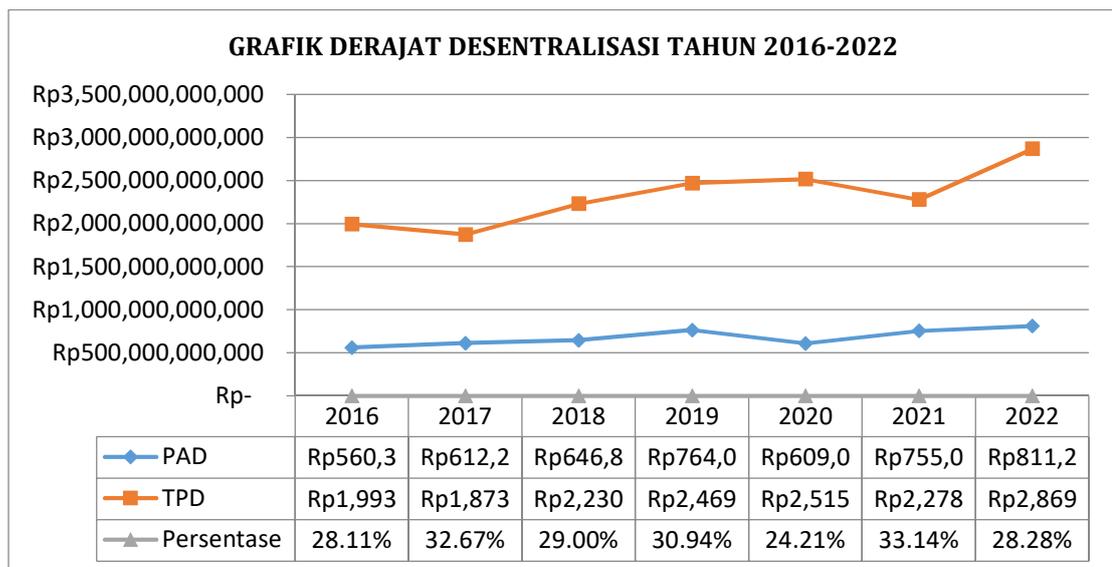
Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian pemerintah daerah terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (Muttaqin et al., 2020). Menurut teori yang berkembang disertai penelitian terdahulu, semakin tinggi kontribusi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Desentralisasi adalah wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2
Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah)

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	Persentase	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2016	Rp560.365.008.676	Rp1.993.392.905.725	28,11%	-Rp18.594.809.797
2017	Rp612.250.040.990	Rp1.873.966.991.358	32,67%	Rp51.885.032.314
2018	Rp646.868.407.485	Rp2.230.736.621.233	29,00%	Rp34.618.366.495
2019	Rp764.087.241.241	Rp2.469.528.492.671	30,94%	Rp117.218.833.756
2020	Rp609.057.640.903	Rp2.515.508.487.764	24,21%	-Rp155.029.600.338
2021	Rp755.062.500.915	Rp2.278.259.847.190	33,14%	Rp146.004.860.011
2022	Rp811.255.755.826	Rp2.869.130.120.906	28,28%	56.193.254.910,77
Rata- Rata	Rp679.849.513.719	Rp2.318.646.209.550	29,48%	33.185.133.907,51

Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)



Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2022 (diolah)

Gambar 3
Grafik Rasio Derajat Desentralisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2 dan Gambar 3 dapat dilihat bahwa Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi dapat dikategorikan belum sepenuhnya memuaskan karena terdapat 4 tahun berkinerja kategori cukup yaitu tahun 2016 dengan persentasi 28,11% atau (Rp18.594.809.796,71), tahun 2018 dengan persentasi sebesar 29,00% atau Rp34.618.366.495,09, tahun 2020 dengan persentasi sebesar 24,21% atau (Rp155.029.600.337,63) dan tahun 2022 dengan persentasi sebesar 28,28% atau sebesar Rp56.193.254.910,77; sedangkan terdapat 3 tahun

berkinerja kategori sedang yaitu tahun 2017 dengan persentasi sebesar 32,67% atau Rp51.885.032.313,72, tahun 2019 dengan persentasi sebesar 30,94% atau Rp117.218.833.755,95 dan tahun 2021 dengan persentasi sebesar 33,14% atau Rp146.004.860.011,37.

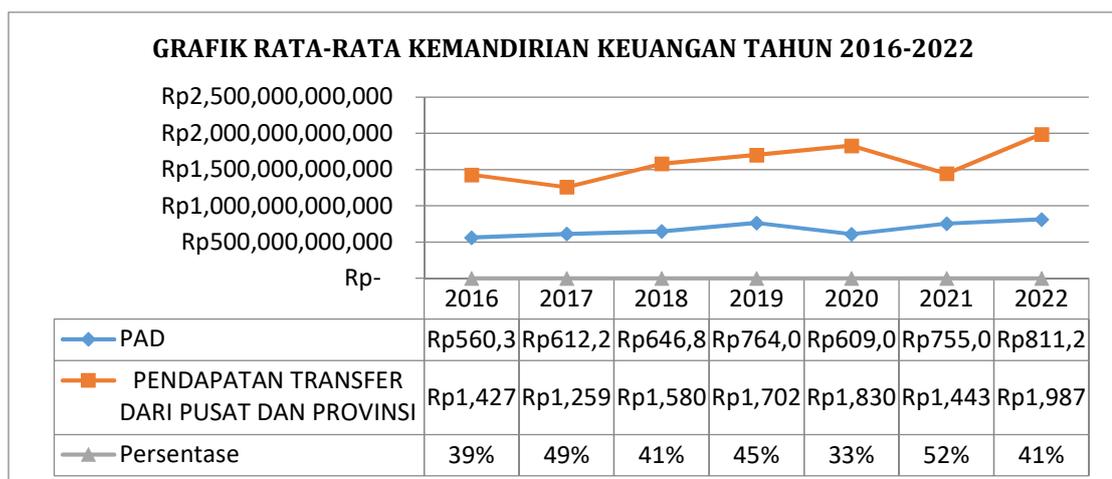
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Nugroho et al., 2023). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah mengartikan bahwa tingkat ketergantungan daerah semakin tinggi terhadap bantuan pihak eksternal. Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan (dalam triliun rupiah)

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer Dari Pusat Dan Provinsi	Persentase
2016	Rp560.365.008.676	Rp1.427.957.897.049	39%
2017	Rp612.250.040.990	Rp1.259.322.950.368	49%
2018	Rp646.868.407.485	Rp1.580.568.213.748	41%
2019	Rp764.087.241.241	Rp1.702.441.251.430	45%
2020	Rp609.057.640.903	Rp1.830.196.140.055	33%
2021	Rp755.062.500.915	Rp1.443.258.420.222	52%
2022	Rp811.255.755.826	Rp1.987.807.473.947	41%
Rata-rata	Rp679.849.513.719	Rp1.604.507.478.117	43%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)



Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)

Gambar 4
Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan (dalam triliun rupiah)

Pola hubungan konsultatif merupakan campur tangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah tersebut dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah daripada daerah lain. Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 4, terdapat 7 tahun yang pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat konsultif yaitu pada tahun 2016 dengan persentasi sebesar 39,82%, pada tahun 2017 dengan persentasi sebesar 48,62%, pada tahun 2018 dengan persentasi sebesar 40,93%, pada tahun 2019 dengan persentasi sebesar 44,88%, pada tahun 2020 dengan persentasi sebesar 33,28% dan tahun 2022 dengan persentase sebesar 40,81%. Pada tahun 2021 terdapat pola hubungan partisipatif yaitu peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerahnya, dengan persentasi sebesar 52,32%. Rasio ini menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai persentasenya akan semakin rendah campur tangan pemerintah pusat terhadap daerahnya, karena pemerintah pusat beranggapan bahwa pemerintah daerahnya mempunyai kemampuan yang cukup dalam mengendalikan otonomi daerahnya sendiri (Nugroho et al., 2023).

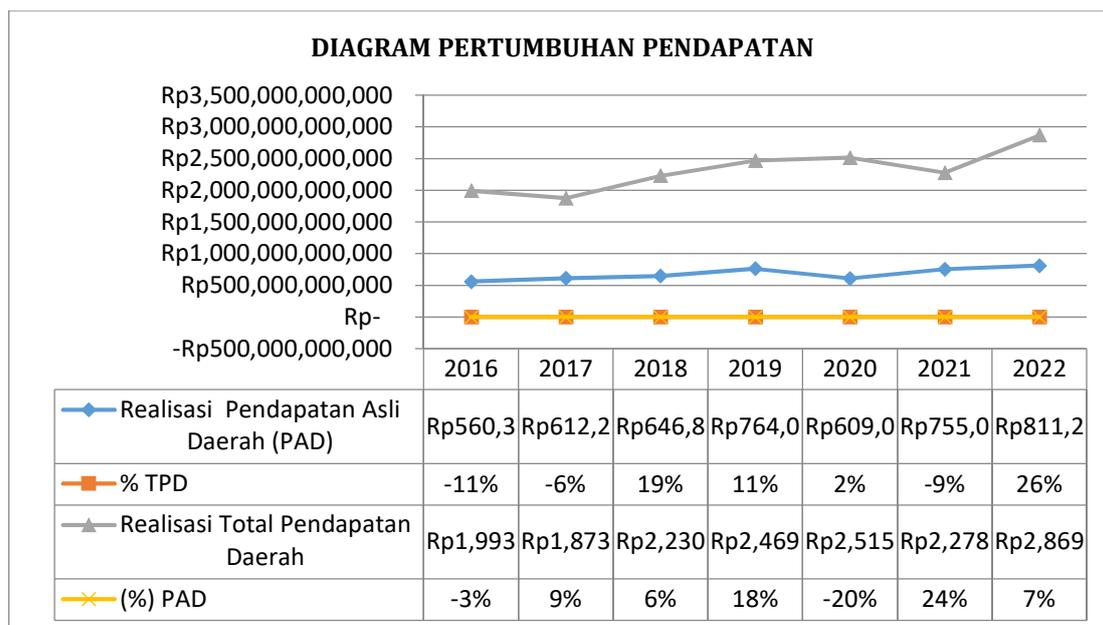
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rasio Pertumbuhan Pendapatan bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang dimaksud atau selama beberapa periode anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Hal ini perlu dilakukan untuk menyikapi program-program yang telah dibuat. Hasil dari perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 5.

Tabel 4
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persentase	Realisasi Total Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase
2016	Rp560.365.008.676	-3%	Rp1.993.392.905.725	-11%
2017	Rp612.250.040.990	9%	Rp1.873.966.991.358	-6%
2018	Rp646.868.407.485	6%	Rp2.230.736.621.233	19%
2019	Rp764.087.241.241	18%	Rp2.469.528.492.671	11%
2020	Rp609.057.640.903	-20%	Rp2.515.508.487.764	2%
2021	Rp755.062.500.915	24%	Rp2.278.259.847.190	-9%
2022	Rp811.255.755.826	7%	Rp2.869.130.120.906	26%
Rata-Rata	Rp679.849.513.719	6%	Rp2.318.646.209.550	5%

Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)



Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)

Gambar 5
Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2022

Berdasarkan penjelasan pada Tabel 4 dan Gambar 5, pada tahun 2016 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan secara negatif dengan persentasi sebesar -3,21% dan realisasi Total Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan negatif sebesar -10,61%, pada tahun 2017. Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan secara positif dengan persentasi sebesar 9,26% dan realisasi Total Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan negatif dengan persentasi sebesar -5,99%, Pada tahun 2018 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan secara positif dengan persentasi sebesar 5,65% dan realisasi total pendapatan daerah mengalami pertumbuhan secara positif sebesar 19,04%, pada tahun 2019 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan secara positif dengan persentasi sebesar 18,12% dan realisasi total pendapatan daerah mengalami pertumbuhan secara positif sebesar 10,70%, pada tahun 2020 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan secara negatif dengan persentasi sebesar -20,29% dan realisasi total pendapatan daerah mengalami pertumbuhan secara positif dengan persentasi sebesar 1,86%, pada tahun 2021 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan secara positif dengan persentasi sebesar 23,97% dan Realisasi total pendapatan daerah mengalami pertumbuhan secara negatif dengan persentasi -9,43%, pada tahun 2022 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan secara positif dengan persentasi sebesar 7,44% dan realisasi total pendapatan daerah mengalami pertumbuhan secara positif sebesar 25,94%. Berdasarkan gambar 3.2 menyatakan bahwa titik terendah pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi pada tahun 2020 dengan persentasi sebesar -20,97% dan titik puncak pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 dengan persentasi sebesar 23,97%. Berdasarkan gambar 3.2 menyatakan bahwa titik terendah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi pada tahun 2016 sebesar -10,61% dan titik puncak pada realisasi total pendapatan daerah tahun 2022 dengan persentasi sebesar 25,94%.

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah

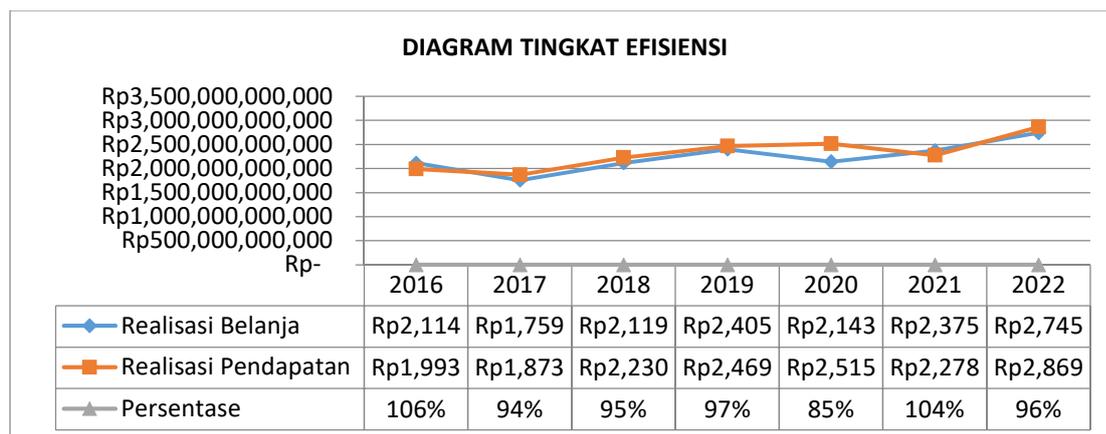
Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi Keuangan Daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat realisasi belanja daerah dengan membandingkan anggaran belanja daerah pada tahun berjalan. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika lebih dari 100% mengidentifikasi terjadinya pemborosan anggaran atau penggunaan anggaran melebihi dari batas yang semestinya. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik karena penggunaan anggaran disesuaikan dengan anggaran belanja yang ada. Hasil dari perhitungan Analisis Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Perhitungan Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Persentase	Kinerja
2016	Rp2.114.716.897.993	Rp1.993.392.905.725	106%	Tidak Efisien
2017	Rp1.759.664.053.268	Rp1.873.966.991.358	94%	Kurang Efisien
2018	Rp2.119.971.369.744	Rp2.230.736.621.233	95%	Kurang Efisien
2019	Rp2.405.320.741.662	Rp2.469.528.492.671	97%	Kurang Efisien
2020	Rp2.143.936.514.177	Rp2.515.508.487.764	85%	Cukup Efisien
2021	Rp2.375.021.817.795	Rp2.278.259.847.190	104%	Tidak Efisien
2022	Rp2.745.398.221.161	Rp2.869.130.120.906	96%	Kurang Efisien
Rata-Rata	Rp2.237.718.516.543	Rp2.318.646.209.550	97%	Kurang Efisien

Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)



Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)

Gambar 6
Grafik Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5 dan gambar 6, Analisis Efisiensi Keuangan Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2016 hingga tahun 2022 terdapat 2 tahun

yang kinerja dihitung tidak efisien yaitu pada tahun 2016 dengan persentasi sebesar 106,09% dan pada tahun 2021 dengan persentasi sebesar 104,25%; terdapat 4 tahun yang kinerja dihitung sebagai kurang efisien yaitu pada tahun 2017 dengan persentasi sebesar 93,90%, pada tahun 2018 dengan persentasi sebesar 95,03%, pada tahun 2019 dengan persentasi sebesar 97,40% dan tahun 2022 dengan persentasi sebesar 95,69%; sedangkan tahun 2020 yang kinerja dihitung cukup efisien dengan persentasi sebesar 85,23%. Kesimpulan dalam analisis efisiensi pada tahun 2016 hingga tahun 2022 titik terendah pada analisis efisiensi terdapat pada tahun 2016 dengan persentasi sebesar 106,09% dan titik tertinggi pada analisis efisiensi terdapat pada tahun 2020 dengan tingkat efisiensi sebesar 85,23%. Menurut teori dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, semakin rendah tingkat persentasi maka akan semakin baik tingkat kinerjanya, sedangkan semakin tinggi tingkat persentasinya maka akan semakin buruk tingkat kinerjanya suatu daerah dalam pengelolaan anggaran belanjanya (Rahardja, 2008).

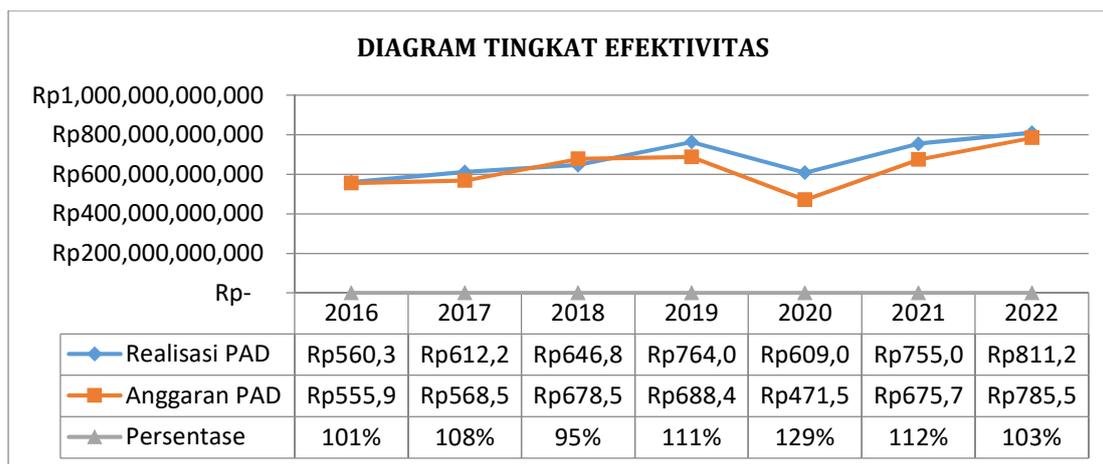
Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut teori dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Hasil dari perhitungan Analisis Efektivitas dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Perhitungan Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Persentase
2016	Rp560.365.008.676	Rp555.970.991.413	101%
2017	Rp612.250.040.990	Rp568.575.283.786	108%
2018	Rp646.868.407.485	Rp678.500.000.000	95%
2019	Rp764.087.241.241	Rp688.424.448.700	111%
2020	Rp609.057.640.903	Rp471.519.353.613	129%
2021	Rp755.062.500.915	Rp675.712.743.600	112%
2022	Rp811.255.755.826	Rp785.515.293.200	103%
Rata-rata	Rp679.849.513.719	Rp632.031.159.187	108%

Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)



Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)

Gambar 7
Grafik Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Berdasarkan perhitungan pada tabel 6 dan gambar 7 menunjukkan bahwa Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2016 dinyatakan berkinerja sangat efektif dengan persentasi 100,79%; pada tahun 2017 dinyatakan berkinerja sangat efektif dengan persentasi sebesar 107,68%; pada tahun 2018 dinyatakan berkinerja cukup efektif dengan persentasi sebesar 95,34%; pada tahun 2019 dinyatakan berkinerja sangat efektif dengan persentasi sebesar 110,99%; pada tahun 2020 dinyatakan berkinerja 129,17% dengan persentasi sebesar 129,17%; pada tahun 2021 dinyatakan berkinerja sangat efektif dengan persentasi sebesar 111,74%; dan pada tahun 2022 dinyatakan berkinerja sangat efektif dengan persentasi sebesar 103,28%. Berdasarkan perhitungan analisis efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah titik terendah terdapat pada tahun 2018 dengan persentasi sebesar 95,34%; sedangkan titik tertinggi pada tahun 2020 dengan persentasi sebesar 129,17% (Rahmayati., 2016)

Analisis KecerAsian Belanja Daerah

Analisis KecerAsian Belanja Daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasional dan belanja modal secara optimal menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasional berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, Analisis KecerAsian Belanja Daerah dapat diformulasikan sebagai berikut:

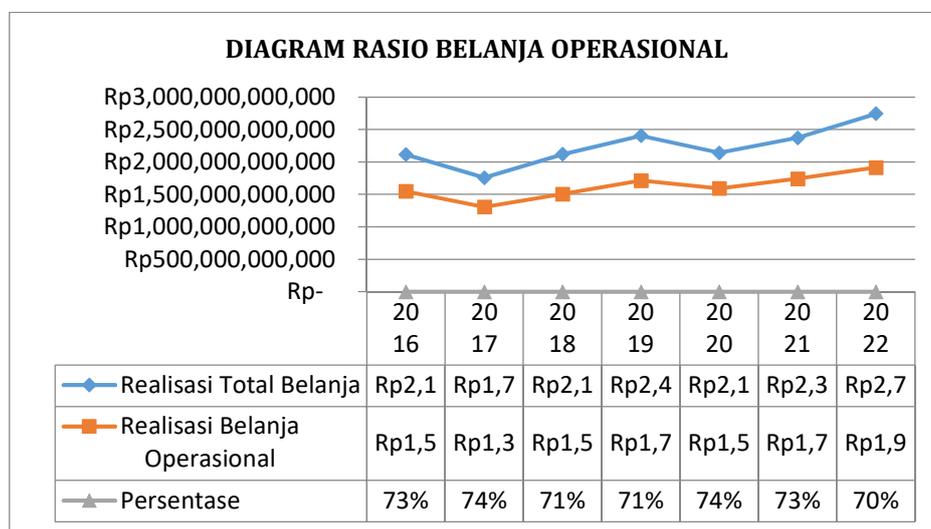
1) Rasio Belanja Operasional

Rasio Belanja Operasional merupakan perbandingan antara total belanja operasional dengan total belanja daerah selama periode tahun berjalan. Berikut hasil perhitungan Rasio Belanja Operasional dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7
Perhitungan Rasio Belanja Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Realisasi Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Operasional (Rp)	Persentase
2016	Rp2.114.716.897.993	Rp1.549.526.450.521	73%
2017	Rp1.759.664.053.268	Rp1.307.594.647.176	74%
2018	Rp2.119.971.369.744	Rp1.508.174.657.439	71%
2019	Rp2.405.320.741.662	Rp1.715.684.334.151	71%
2020	Rp2.143.936.514.177	Rp1.594.807.894.013	74%
2021	Rp2.375.021.817.795	Rp1.744.051.495.996	73%
2022	Rp2.745.398.221.161	Rp1.915.925.588.617	70%
Rata-rata	Rp2.237.718.516.543	Rp1.619.395.009.702	73%

Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)



Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)

Gambar 8
Grafik Rasio Belanja Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 7 dan gambar 8 di atas diketahui rata-rata persentase rasio belanja operasional pada tahun 2016 hingga tahun 2022 adalah 73%; dengan rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2020 dengan persentase 74,39% dan paling rendah terjadi pada tahun 2022 dengan rasio persentase 69,79%. Menurut teori dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio belanja operasional maka akan semakin kecil persentasi dana yang digunakan untuk belanja modal (Surastowo, 2019).

2) Rasio Belanja Modal

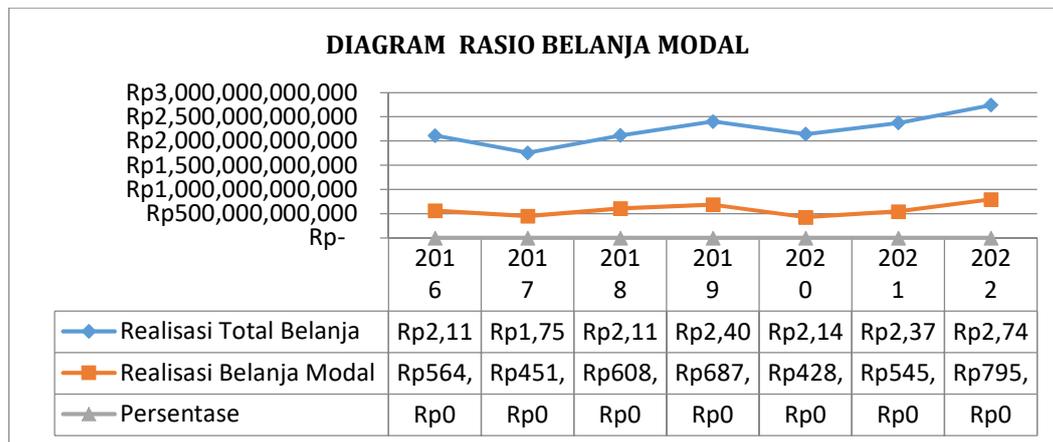
Rasio Belanja Modal merupakan antara total belanja modal dengan total belanja daerah. Menurut teori dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, Semakin tinggi rasio belanja modal pada suatu daerah maka akan kecil realisasi total

belanja yang digunakan (Todaro, 2009). Hasil dari perhitungan Rasio Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Perhitungan Rasio Belanja Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Realisasi Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Persentase
2016	Rp2.114.716.897.993	Rp564.259.837.372	27%
2017	Rp1.759.664.053.268	Rp451.891.556.091	26%
2018	Rp2.119.971.369.744	Rp608.340.577.921	29%
2019	Rp2.405.320.741.662	Rp687.770.681.357	29%
2020	Rp2.143.936.514.177	Rp428.692.685.695	20%
2021	Rp2.375.021.817.795	Rp545.701.475.496	23%
2022	Rp2.745.398.221.161	Rp795.946.626.435	29%
Rata-rata	Rp2.237.718.516.543	Rp583.229.062.909	26%

Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)



Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)

Gambar 9
Grafik Rasio Belanja Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 8 dinyatakan bahwa pada tahun 2016 tingkat persentasi Belanja Modal terhadap Realisasi Total Belanja mencapai 26,68%; pada tahun 2017 tingkat persentasi Belanja Modal terhadap Realisasi Total Belanja mencapai 25,68%; pada tahun 2018 tingkat persentasi Belanja Modal terhadap Realisasi Total Belanja mencapai 28,70%; pada tahun 2019 tingkat persentasi Belanja Modal terhadap Realisasi Total Belanja mencapai 28,59%; pada tahun 2020 tingkat persentasi Belanja Modal terhadap Realisasi Total Belanja mencapai 20%; pada tahun 2021 tingkat persentasi Belanja Modal terhadap Realisasi Total Belanja mencapai 22,98%; dan pada tahun 2022 tingkat persentasi Belanja Modal terhadap Realisasi Total Belanja mencapai 28,99%. Kesimpulannya adalah pada tahun 2020 menguasai persentasi terkecil yaitu sebesar 20%; sedangkan persentasi terbesar terdapat pada tahun 2022 sebesar 28,99%.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2016 hingga tahun 2022 menghasilkan Analisis Varians Pendapatan Keuangan Daerah Kota Balikpapan rata-rata realisasi anggaran lebih besar dibandingkan anggaran pendapatan. Dengan kata lain pemerintah daerah mengalami kinerja yang baik dalam mengelola pendapatan mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2022 dengan rata-rata mencapai 100% lebih selama 7 tahun perhitungan. Dengan titik puncak terdapat pada tahun 2020 dan titik terendah terdapat pada tahun 2016. Rasio keuangan pemerintah daerah Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2016 hingga tahun 2022 menghasilkan beberapa rasio yaitu rasio desentralisasi keuangan daerah yang menunjukkan perlu adanya peningkatan ditahun kedepan dikarenakan pada periode tahun penelitian tingkat tertinggi mencapai 33,14% dengan kinerja sedang pada tahun 2021; rasio kemandirian keuangan daerah menghasilkan bahwa persentasi tertinggi mencapai 52,32% pada tahun 2021; sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2022 dengan titik persentasi realisasi pendapatan asli daerah sebesar 7,44% dan realisasi total pendapatan daerah sebesar 25,94%. Simpulan dari rasio keuangan menunjukkan kinerja pemerintah daerah harus ditingkatkan dimasa depan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, selain itu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus selalu ditingkatkan setiap tahunnya.

Analisis efisiensi Keuangan daerah Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2016 hingga tahun 2022 menghasilkan dengan persentase kinerja cukup efisien terdapat pada tahun 2020 sebesar 85,23%, pada analisis efisiensi semakin kecil persentasi maka kinerja akan semakin baik; sedangkan pada analisis efektivitas keuangan daerah kota Balikpapan dengan persentase kinerja sangat efektivitas terdapat pada tahun 2020 sebesar 129,17%, pada analisis efektivitas semakin tinggi rasionya maka akan semakin baik kinerja. Simpulan dari analisis efisiensi dan efektivitas menunjukkan saling berkesinambungan karena semakin efisien keuangan yang digunakan dengan persentasi rendah maka akan semakin efektifitas tinggi dalam pengelolaan keuangan. Analisis keserasian belanja daerah Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2016 hingga tahun 2022 menghasilkan perhitungan dibeberapa rasio seperti rasio belanja operasional yang menunjukkan kinerja terbaik terjadi pada tahun 2020 sebesar 74,39%, semakin tinggi rasio belanja operasional maka akan semakin kecil persentasi dana yang digunakan untuk belanja modal; rasio belanja modal menunjukkan kinerja terbaik terjadi pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 20,00%.

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah Pemerintah Kota Balikpapan khususnya Dinas Pendapatan Daerah perlu memperhatikan potensi pajak yang masih belum maksimal agar dibuatkan peraturan khusus, mensosialisasikan dan mempermudah layanan penerimaan yang lebih mudah dengan didukung teknologi yang lebih canggih dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan porsi belanja modal yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi Daerah.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis Kinerja Keuangan Kota Balikpapan dan disarankan untuk menambah rasio analisis agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

DAFTAR RUJUKAN

Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

- Sukoharjo tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA*, : Vol.1(1).
<https://doi.org/ISSN : 2503-3565>
- Karlina, A dan Handayani, N. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012 – 2015. *Jurnal Riset Akuntansi*, : Vol.6, 3.
- Badrudin. (2012). *Ekonomi Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Dude, D;P, Kumenaung, A. D. R. (2014). Analisis Kinerja Keuangan dan Fiskal Illusion pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Faisal, H. H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal of Economics and Bussiness*, Vol. 4, 1. <https://doi.org/SSN : 2597-8829>.
- Agustina, F, Pramono, A, J, Akbar, B. (2021). *Faktor- Faktor yang Menentukan Rendahnya Kemendirian Keuangan Daerah: Otonomi Keuangan dan Tingkat Desentralisasi. Economics Development Analysis*. : Vol.8, 1. <https://doi.org/ISSN : 2460-3937>
- Halim, A. (2009). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Cetakan Ke). Salemba Empat.
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Daerah*. Salemba Empat.
- Handayani, A. K. dan N. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012 – 2015. *Riset Akuntansi*, : Vol.6(3), ISSN : 2460-0585.
- Hery. (2015). *Analisis laporan keuangan : pendekatan rasio keuangan*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Ihwanudin, N., Maulida, S., Fatriansyah, A. I. A., Rahayu, S. S., Rahman, M. R. R., Fachri, S., Rijal, K., Agrosamdhyo, R., Senjiati, I. H., Isnandar, F. R., & Jiwantar, F. A. (2020). Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Praktis). In *Konsep Ekonomi Dan Perbankan Dalam Islam*.
- Gultom, M, Sinurat, A D. D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* :, Vol.2 No.1, 2614-7181.
- Musthafa. (2017). *Manajemen Keuangan*. : CV. Andi Offset.
- Muttaqin, I., Rini, R., & Fatriansyah, A. I. A. (2020). Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Three Stages Frontier Analysis. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(2), 115–129. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i2.119>
- Nugroho et al., 2023. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Praktik Penulisan Artikel Bidang Akuntansi. Kabupaten Bandung:Widina Media Utama*.
- Nugroho, L., Fajarsari, I. M., Solikin, A., Yusdita, E. E., Fatriansyah, A. I. A., Irwanto, I., Atiningsih, S., Susilawati, N., Gainau, P. C., Hippy, M. Z., Rahmadi, H., Januarsi, Y., & Faisal, I. A. (2023). Metodologi Penelitian Akuntansi dan Praktik Penulisan Artikel Bidang Akuntansi. In *Cv Widina Media Utama*.
- Martaliah, N, Wahyuli, P, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi periode Tahun 2013-2018. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol.4(3), 2598-9944.
- Rahardja, M. (2008). *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahmayati., A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA*, : Vol.1, 2503-3565.
- Surastowo. (2019). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2014-2018. *Jurnal Simplex*, Vol.1(3).
- Todaro, M. P. dan S. C. S. (2009). *Pembangunan Ekonomi* ((Edisi Ketiga). Erlangga.